

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

- Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Yarsif Watampone. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Cetakan ke- 7. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ariman Rasyid dkk. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Palembang Unsri Press.
- Azhary Muhammad Tahir. 1992. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam. Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jimly Ashiddiqie. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Badruzzaman Siddik. 2014. *Perkembangan Peradilan di Indonesia Sejak Zaman Kolonial Belanda Sampai Sekarang. Edisi Revisi Ke-2*. Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. Bandar Lampung.
- Bambang Sutiyoso. dkk. 2005. *Aspek-Aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. UII Pres. Yogyakarta.
- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta. 2014. "Penemuan Hukum Dalam Kajian Filsafat Hukum". dalam Pendulum Antinomi Hukum. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Chairul Huda. 2013. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta.

- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Gusu Prayudi. 2010. *Tindak Pidana Korupsi dipandang Dalam Berbagai Aspek*. Pena Pustaka. Yogyakarta.
- Hans Nawiasky. 1948. *Allgemeine als recht System Lichen Grundbegriffe*. cet. 2.
- Indrati Maria Parida. 1998. *Ilmu Perundang-undangan. Disarikan dari Perkuliahan Hamid S. Attamimi*. Kanisius. Yogyakarta.
- J.J.H. Bruggink. 1996. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kelsen Hans. 2010. *teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State) Diterjemahkan Rasul Muttakin*. (Bandung. Cetakan ke IV. Nusa Media)
- Mahadi. 2003. *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*. Alumni. Bandung
- Makarao Muhammad Taufik. dan Suharsil. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. cet ke-1. Ghalia Indah. Jakarta.
- Marbun. S.F. 1997. *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. No. 9 Vol. 4.
- Musakkir. 2014. *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Ni'matul Huda. 2005. *Negara Hukum demokrasi dan judicial Review*. Cetakan Pertama UII Press. Yogyakarta.
- Notohamidjoyo O. 1975. *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*. BPK. Gunung Mulia. Jakarta.
- Panji Purnama. 2021. *Penerapan E-Court Sebagai Salah Satu Cara Mewujudkan Integrated Judiciary pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta.

- Sidharta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Alumni. Bandung.
- Soedikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta
- Soehino. 1992. *Hukum Tata Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*. cet. Ke-1. Liberty. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. CV. Ramadja Karya. Bandung.
- \_\_\_\_\_ 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Valerine J.L. Kriek hoff. 2014. *Genta Publishing*. Yogyakarta.
- Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Banding. Kasasi. dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan

### **C. Lain-lain**

<http://achmadrhamzah.blogspot.co.id/2011/01/skripsi-hukum-tinjauan-yuridis.html> diakses pada tanggal 05 April 2022 pukul 12.00 WITA

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html> diakses pada tanggal 7 April 2022 pukul 11.23 WITA

<https://www.kemkes.go.id/resources/download/infoterkini/Covid19/TENTANG%20NOVEL%20CORONAVIRUS.pdf>, diakses 10 Januari 2021

Adi Rukmono Sulistyono, "Etika Propesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (*Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim*)". Skripsi UIN Raden Intan Lampung.

Akmal Razaq Nur, "Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 1 No. 3: 1227-1230.

Jamie Young, *A Virtual Day in Court Design Thinking and Virtual Courts*, <https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/reports/a-virtual-day-in-court.pdf> diakses pada tanggal 6 April 2022 pukul 14.25 WITA.

Jimmy, KPT Tanjung Karang: *Pelayanan E-Court Menjangkau Pelosok Available online at: <https://www.mahkamahagung.go.id/>*. 2018, diakses pada tanggal 05 April 2022, Pukul 13.00 Wita

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court. (<https://ecourt.mahkamahagung.go.id> . 2018). hal. 3 diakses pada tanggal 6 April 2022, pukul 14.34 WITA

Nur Akmal Razaq. 2020. "Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 1 No. 3: 1227-1230. h. 1228

Panji Purnama, "Penerapan E-Court Sebagai Salah Satu Cara Mewujudkan *Integrated Judiciary* pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2021), h. 95-120  
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Poerana, Sigar Aji, *Pelaksanaan E-Court dan Manfaatnya*. Available online at: <https://www.hukumonline.com/>, 2020, diakses pada tanggal 5 April 2022

[www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1](http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1)  
diakses pada tanggal 05 April 2022 pukul 11.02 WITA